

1. Pendahuluan

Kegiatan monitoring berbasis data SIM menjadi satu tema penting dalam agenda EGM Monev 2013, tema ini sangat relevan mengingat lingkup lokasi sasaran program PNPM Perkotaan yang sangat besar dan tahapan kegiatan pemberdayaan yang relatif cukup banyak. Pemanfaatan data SIM sebagai sumber data/informasi menjadi suatu keharusan agar informasi perkembangan kegiatan di lapangan dapat dimonitor dan disajikan secara cepat dengan dukungan sumber data yang akurat dan konsisten. Infrastruktur dan dukungan pengembangan aplikasi SIM yang ada saat ini dipandang sudah berjalan cukup baik bahkan beberapa data bisa diakses secara online. Perkembangan yang luar biasa ini harus direspon dengan upaya-upaya yang lebih konsisten untuk mendorong pencapaian program melalui optimalisasi tugas-tugas pengendalian program yang merupakan salah satu pokok penugasan konsultan.

Data SIM P2KP memiliki muatan informasi yang sangat luas lingkungannya dengan volume data yang sangat besar, dipihak lain monitoring dan evaluasi tematik menjadi bagian dari pilihan strategi pengendalian yang memungkinkan adanya konsistensi fokus dan model penyajian informasi berbasis kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya spesifik. Melalui diskusi dan sharing pengalaman antar pelaku pada EGM Monev 2013 maka munculah gagasan untuk memformulasikan adanya mekanisme dan format pengendalian yang sifatnya baku agar ada lokus pengamatan yang seragam antar level manajerial. Format dimaksud adalah sheet progress yang berbasis data SIM dan sepakat untuk dikelola diseluruh level (Kota/kab – Provinsi – Pusat) secara rutin.

Secara operasional sheet progress ini dibangun dengan kerangka pikir monitoring *base on problem*, disini *kegiatan* pengendalian ditata untuk mengamati pencapaian progres dan output pendampingannya secara progresif mengikuti varian perkembangan yang terekam melalui data SIM, terhadap pencapaian progress yang sangat rendah harus diberikan penjelasan yang cukup sebagai informasi pendukung agar hambatan dan permasalahan yang terjadi dapat ditindaklanjuti dengan upaya-upaya perbaikan yang terukur dan kongkrit untuk mendongkrak kembali kinerja pendampingan program di tingkat masyarakat. Mekanisme ini diharapkan menjadi instrumen mekanis yang mendorong pencapaian output pendampingan secara maksimal

Data SIM P2KP yang dibangun secara online seharusnya menjadi media komunikasi yang kuat dan akurat karena data-data kegiatan dapat diakses secara riil time oleh seluruh level pengendali sehingga control terhadap progress sebenarnya dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan kebutuhan dan situasinya, dengan pemikiran seperti ini maka sheet progress berbasis data SIM hanya akan memberikan nilai manfaat yang maksimum apabila secara fungsi dapat dikelola secara konsisten dengan melibatkan seluruh level pengendalian. Sheet progress bukan melulu sebuah resume report bulanan tetapi penekanannya lebih diarahkan pada penyiapan baseline status untuk membantu merumuskan tindakan-tindakan perbaikan sesuai kebutuhan. Tindakan perbaikan seyogyanya dapat terus dikomunikasikan dan dipantau perkembangannya melalui media komunikasi dan koordinasi yang selama ini sudah terbangun (teleconference, rapat progress, SIM Day, dsb).

Dari hasil konsolidasi sheet progress periode Juni-2012, dapat ditunjukkan bahwa tingkat menyajikan data yang lengkap dan akurat secara waktu masih menjadi masalah yang serius, beberapa kota/kabupaten di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan misalnya; masih terkendala

dengan aliran data SIM yang terlambat, permasalahan tersebut perlu ditangani lebih awal agar kesenjangan informasi antara realisasi aktual dilapangan dengan informasi yang terbaca dalam SIM dapat ditekan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya data SIM dapat merepresentasikan gambaran kemajuan di lapangan. Secara kalkulatif kelemahan pada kelengkapan data akan sangat berpengaruh pada capaian kinerja yang terukur dan ini berarti kemajuan pendampingan menjadi “tidak bernilai” manakala tidak bisa dibuktikan melalui penyajian data SIM.

2. Status Data

Data yg digunakan dalam analisis ini adalah data sheet progress status 25 Juni 2013 yang proses konsolidasinya dilakukan secara berjenjang. Sebanyak 16 provinsi telah mengirimkan *sheet progress* untuk periode bulan Juni-2013; tiga provinsi yang belum berpartisipasi melakukan pengendalian *sheet progress* ini adalah Provinsi Jawa Tengah, Maluku Utara, dan Papua Barat.

Pada periode pertama pengiriman *sheet progress* ini, masih ditemukan beberapa kasus data isian yang kurang valid khususnya yang menyangkut waktu (tanggal) ketika terlampainya >90% kelurahan menyelesaikan sebuah tahapan siklus; sebagaimana terjadi di Provisin Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara; waktu dimaksud (tidak sama) dengan tanggal pelaporan *sheet progress*. Kasus lain adalah data yang tidak terbaca karena formatnya berbeda seperti terjadi di Sulawesi Barat. Data sheet dari Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Barat dinilai tidak cukup lengkap untuk diolah karena tanggal selesai siklus tidak terisi; khusus untuk ketiga provinsi dimaksud datanya tidak disertakan dalam analisis agar hasil analisis dapat dijaga akurasinya. Status data per-provinsi dapat dilihat dalam tabel berikut :

Provinsi	Tgl Kirim	Status	%QS	%PM	%Dev
JAWA TENGAH		Tidak kirim	n/a	n/a	n/a
D.I. YOGYAKARTA	26-Jun	Data lengkap	65	29	36
JAWA TIMUR	28-Jun	Data lengkap	30	5	25
BALI	26-Jun	Data lengkap	-	-	-
NUSA TENGGARA BARAT	04-Jul	%Miskin, %Permp kosong	84	43	41
NUSA TENGGARA TIMUR	02-Jul	Data lengkap	94	86	8
KALIMANTAN TENGAH	04-Jul	Data lengkap	15	2	13
KALIMANTAN SELATAN	05-Jul	%Miskin, %Permp kosong,	20	0	20
KALIMANTAN TIMUR	25-Jun	Data lengkap	3	11	-7
SULAWESI UTARA	28-Jun	Tanggal tdk dicantumkan. %Miskin & %Permp kosong	n/a	n/a	n/a
SULAWESI TENGAH	05-Jul	Data lengkap	77	52	25
SULAWESI SELATAN	05-Jul	Tanggal tdk valid, %Miskin & %Perp kosong	19	19	0
SULAWESI TENGGARA	29-Jun	%Miskin, %Permp kosong, Tgl perlu di cek	84	80	3
GORONTALO	26-Jun	Tanggal tdk dicantumkan, %Miskin , %Perp kosong	n/a	n/a	n/a

SULAWESI BARAT	04-Jul	Format tdk sesuai	n/a	n/a	n/a
MALUKU	02-Jul	%Miskin, %Permp kosong	37	5	32
MALUKU UTARA		Tidak kirim	n/a	n/a	n/a
PAPUA BARAT		Tidak kirim	n/a	n/a	n/a
PAPUA	06-Jul	Data lengkap	44	44	0

Sheet progress Provinsi Bali meskipun status datanya baik namun dari sisi analisis data belum bisa disajikan karena pada periode ini (25-Juni-2013) kegiatan yang diolah adalah kegiatan yang secara master schedule sudah selesai; yaitu refleksi 3 tahunan dan refleksi kemiskinan yang keduanya merupakan kegiatan di lokasi tahun-4. Sementara di Provinsi Bali seluruhnya merupakan lokasi tahun-2.

Selisih rata-rata tingkat kelengkapan data QS dengan PM (%Dev) Provinsi masih cukup bervariasi; deviasi masih cukup besar terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, D.I. Yogyakarta, Sulawesi Tengah, dan Maluku. Deviasi negatif juga terjadi di Provinsi Kalimantan Timur artinya kelengkapan data SIM PM lebih cepat dibandingkan kemajuan kegiatan yang terekan dalam QS. Secara lebih detail kasus deviasi negatif juga banyak terjadi pada kegiatan audit pembukuan LKM dimana tercatat ada 18 kota/kab, pada siklus lainnya juga masih ditemukan tetapi jumlahnya relatif sedikit.

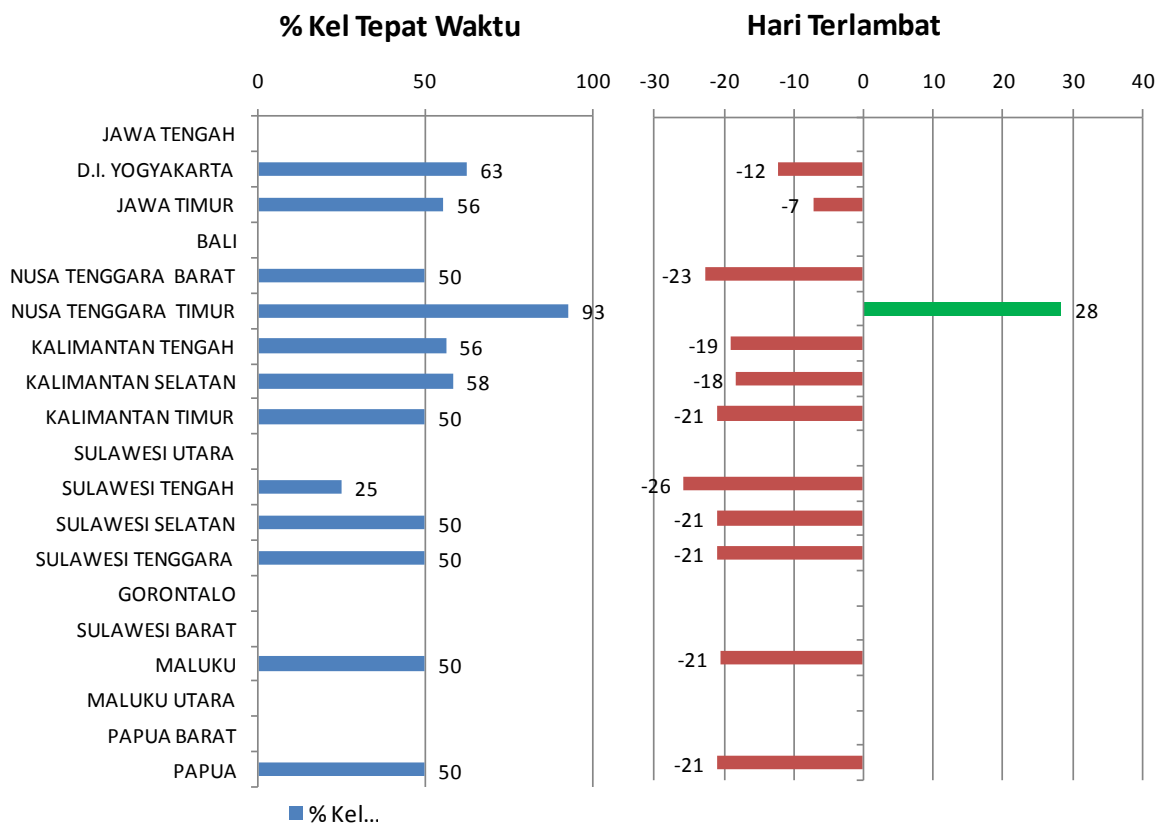
3. Manajemen Waktu Pelaksanaan Siklus

Target performance :

- *Min 90% kel menyelesaikan kegiatan siklus secara tepat waktu*
- *Min jumlah hari keterlambatan dalam pelaksanaan siklus sebesar 14 hari*

Manajemen waktu pelaksanaan siklus masyarakat diukur dari dua sisi; *pertama* terkait dengan persentase jumlah kelurahan yang menyelesaikan kegiatan siklus secara tepat waktu dan kedua diukur dari tingkat ketepatan secara waktu dalam penyelesaian siklus di tingkat kota/kabupaten. Kinerja waktu pelaksanaan siklus merupakan bagian dari ukuran kinerja program secara keseluruhan, capaian kinerja ini sangat berhubungan erat dengan ukuran-ukuran efisiensi pelaksanaan program. Kinerja waktu pelaksanaan menjadi penting karena perjalanan waktu (pelaksanaan program) pasti berimplikasi pada penyediaan sumberdaya (SDM, Financial, dll).

Secara nasional sebanyak 54,2% kelurahan yang dapat menyelesaikan kegiatan siklus secara tepat waktu sesuai master schedule; artinya masih terdapat 45,8% kelurahan yang terlambat menyelesaikan siklus. Secara keseluruhan juga telah terjadi keterlambatan pelaksanaan kegiatan siklus dengan rata-rata keterlambatan selama (-15) hari. Secara detail realisasi atas kerangka waktu pelaksanaan siklus dapat dilihat dalam tabel berikut :



Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kinerja manajemen waktu pelaksanaan siklus yang paling baik dengan capaian 93% bahkan terjadi surplus atau percepatan kegiatan sebanyak 28 hari, provinsi lainnya tidak ada yang melampaui target performance untuk aspek manajemen waktu. Khusus Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Timur capaian sub-indikator persentase jumlah kelurahan tepat waktu masing-masing hanya sebesar 63% dan 56% atau dibawah *target performance*; meskipun demikian dari sisi ketepatan waktu dapat melampaui *target performance* (min -14 hari terlambat).

Kinerja waktu pelaksanaan siklus diukur dari kesesuaian antara perencanaan kegiatan dengan realisasinya yang terukur melalui SIM QS 2013. Dalam konteks ini yang dihitung adalah jumlah kelurahan yang dapat memenuhi batas waktu yang ditetapkan dalam master schedule. Perhitungan kinerja waktu hanya diterapkan untuk kegiatan siklus yang seharusnya sudah dinyatakan selesai oleh master schedule. Per-25 Juni 2013 kegiatan siklus yang seharusnya selesai adalah kegiatan siklus refleksi 3 tahunan dan refleksi kemiskinan yang seluruhnya merupakan item kegiatan siklus tahun ke-4. Kegiatan audit keuangan LKM TB-2012 belum dimasukkan sebagai variabel perhitungan kinerja karena secara master schedule baru dinyatakan selesai pada tanggal 30-Juni-2013.

4. Capaian Output

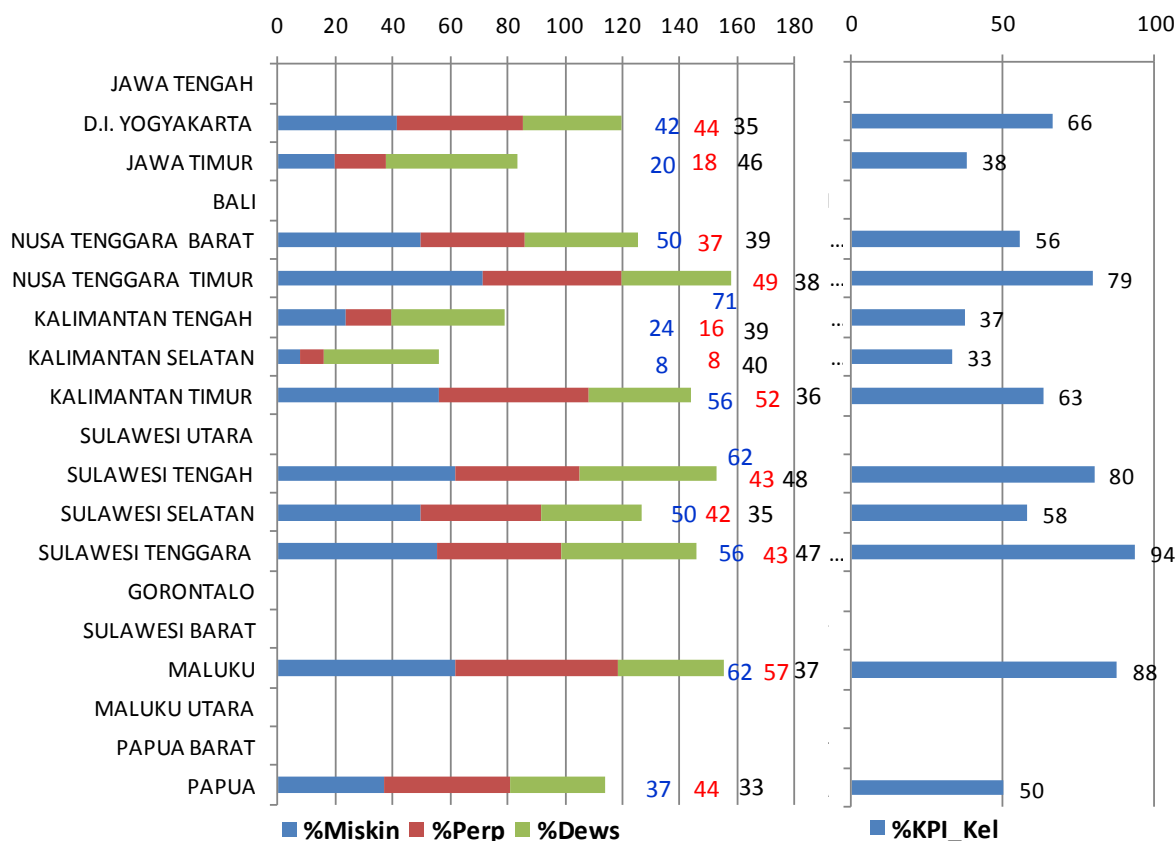
Target performance :

- *Min 90% kel memenuhi target PAD (partisipasi; miskin, perempuan, pemilih dewasa)*
- *Min capaian output memenuhi target PAD (parts miskin >40%; parts perempuan >40%; pemilih dewasa >30%)*

Nilai pencapaian output diukur dari dua sisi; *pertama* adalah persentase jumlah kelurahan yang mampu mencapai target minimal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam (PAD), *kedua* adalah nilai dari capaian indikator tersebut di tingkat kota/kabupaten. Pencapaian output diukur melalui sub-indikator terkait partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan dan pengambilan keputusan; variabel yang dihitung adalah partisipasi pada kelompok miskin dan perempuan, serta tingkat partisipasi penduduk dewasa dalam kegiatan Pemilu BKM/LKM.

Sampai dengan periode Juni-2013, masih diperlukan proses editing terhadap data capaian output mengingat adanya sejumlah kota/kabupaten yang tidak memiliki kelurahan tahun-4 sementara hingga bulan ini kegiatan siklus yang dihitung adalah kegiatan refleksi 3 tahunan dan refleksi kemiskinan yg merupakan siklus tahun-4. Konsekuensinya di kota/kabupaten dimaksud belum dapat dihitung capaiannya (%Miskin dan %Permp).

Secara nasional terdapat sekitar 61,9% kelurahan yang dapat mencapai target ketiga indikator output (%Miskin, %Perp, %Dws), artinya masih ada 38,1% kelurahan yang belum mencapai *target performance*. Rendahnya pencapaian output ini lebih banyak diakibatkan oleh status data SIM 2013 yang belum terentry dalam aplikasi sehingga nilai partisipasi perempuan dan miskin menjadi 0 (**no!**); sementara untuk indikator partisipasi pemilih dewasa nilainya tetap bisa diambil karena data yang diambil pada dasarnya adalah data pemilih pada pemilu LKM terakhir. Kondisi diatas sedikitnya memberikan catatan bahwa hasil pencapaian output belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil pencapaian di tingkat lapangan karena nilai akhirnya masih dipengaruhi oleh faktor minimnya entry data SIM seperti yang terjadi di Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. Secara keseluruhan rata-rata tingkat capaian output dan persentase kelurahan tercapainya dapat dilihat dalam grafik berikut :



Dilihat dari sebaran pencapaian output di tingkat provinsi dapat ditunjukkan bahwa secara umum indikator %Miskin, %Peremp, dan %Dewasa dapat dicapai dengan baik dimana capaian %Dewasa jauh lebih stabil berada pada *range* 33%-48% atau seluruhnya berada diatas target KPI, artinya pencapaian nilai output sebenarnya banyak dikontribusi oleh pencapaian pada indikator pemilih dewasa pada Pemilu LKM dibanding kedua sub-indikator lainnya (%Miskin dan %Perp); untuk capaian kedua sub-indikator tersebut tercatat ada tiga provinsi yang capaiannya masih dibawah target performance yaitu Jawa Timur (20% ; 18%), Kalimantan Tengah (24% ; 16%), dan Kalimantan Selatan (8% ; 8%).

Dari grafik diatas juga dapat dilihat bahwa persentase jumlah kelurahan tercapai sangat bervariasi. Capaian terbaik terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan capaian 94% kelurahan tercapai disusul Provinsi Maluku 88%, Sulawesi Tengah 80%, dan Nusa Tenggara Timur sebanyak 79%.

5. Analisis Kuadran

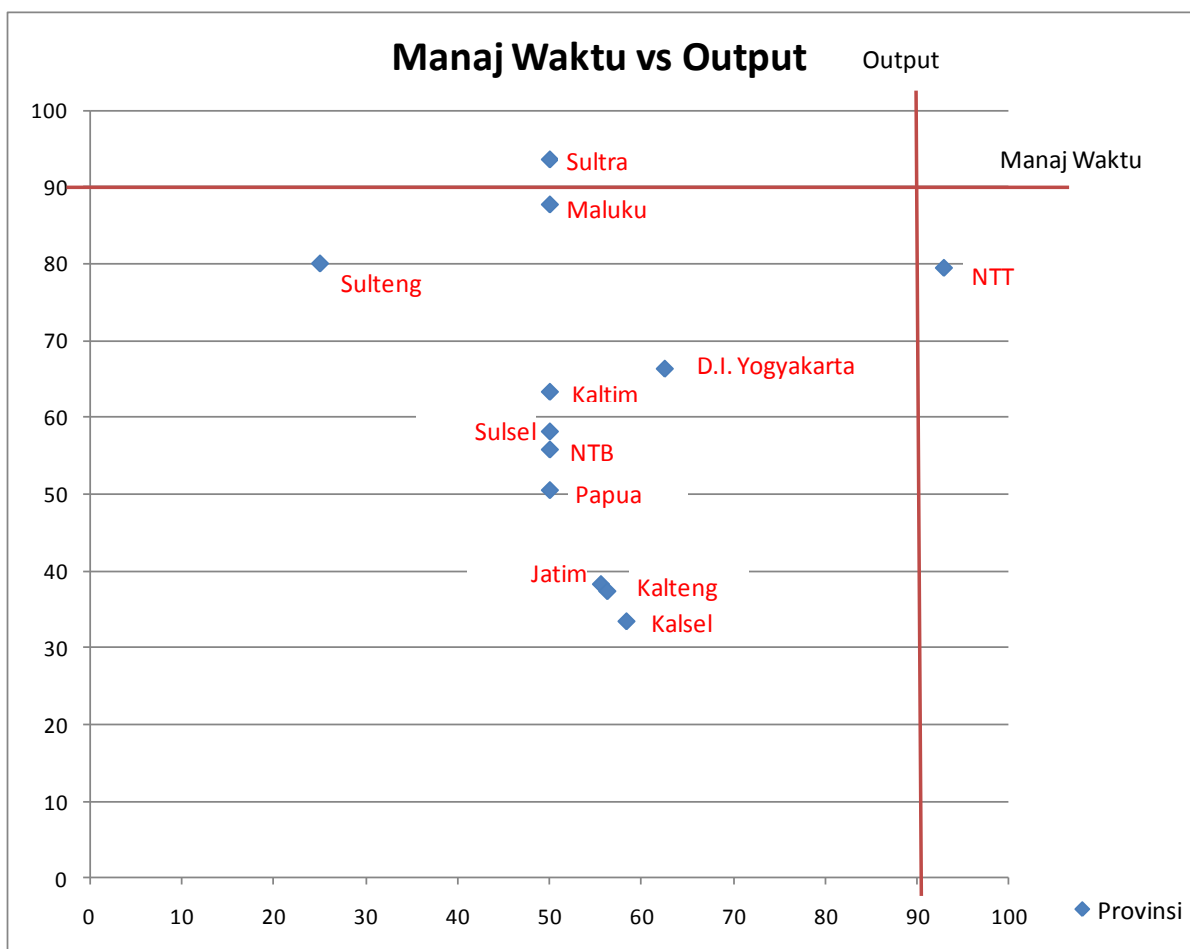
Analisis kuadran diterapkan untuk melihat peta capaian per-provinsi berdasarkan dua variabel utama, yaitu pencapaian terhadap kinerja waktu pelaksanaan siklus yang diukur dari persentase kelurahan yang dapat menyelesaikan kegiatan secara tepat waktu dan pencapaian terhadap output pemberdayaan yang hitung dari persentase jumlah kelurahan yang indikator outputnya tercapai (%miskin, %perempuan, dan %dewasa). Kedua variabel tersebut di plot dalam bidang kartesian dimana sumbu X merupakan skala nilai untuk manajemen waktu dan

sumbu Y sebagai nilai capaian output. Koordinat (0;0) di pindahkan ke titik (90;90) karena *target performance* untuk kedua variabel tersebut berada pada titik (90% ketepatan waktu; 90% kelengkapan memenuhi KPI).

Ruang kuadran dari kinerja hasil pendampingan masyarakat adalah sbb :

- Kuadran I (ketepatan waktu → tercapai ; output → tercapai)
- Kuadran II (ketepatan waktu → tidak tercapai ; output → tercapai)
- Kuadran III (ketepatan waktu → tidak tercapai ; output → tidak tercapai)
- Kuadran IV (ketepatan waktu → tercapai ; output → tidak tercapai)

Secara grafis hasil plotting nilai kinerja waktu dan output yang dicapai provinsi



Dari gambar diatas pada umumnya pencapaian per-provinsi berada di Kuadran III; dimana pencapaian nilai manajemen waktu dan output nilainya tidak tercapai. Khusus untuk Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Timur yang posisinya masing-masing di Kuadran II dan IV. Sebaran ini menunjukkan bahwa problem terbesar yang terjadi hampir merata di seluruh provinsi adalah persoalan manajemen waktu yang masih rendah sehingga OSP sangat disarankan untuk segera melakukan upaya-upaya konsolidasi tim untuk menata kembali sistematika perencanaan kerja tim fasilitator pendampingnya agar perencanaan kegiatan lapangan berbasis target waktu yang terukur dan dapat mensupport pencapaian master schedule provinsi maupun nasional. Monitoring perkembangan siklus perlu dikontrol secara

lebih ketat dan berkala melalui SIM QS yang ada dan realisasi atas perencanaan tim juga dapat terus dievaluasi secara berjenjang.

Secara terintegratif upaya peningkatan kapasitas khususnya di Provinsi Kalsel, Kalteng, Jawa Timur, Papua, NTB, dan Kalimantan Selatan perlu dilakukan terkait upaya-upaya peningkatan kapasitas pendamping yang lebih fokus pada strategi fasilitasi yang lebih mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan-kegiatan siklus seperti memperluas jaringan aktor kunci ditingkat lokal atau memperbanyak agenda pertemuan khusus ditingkat kelompok perempuan dan miskin/rentan.

6. Rating Kinerja Propinsi

Rating kinerja pendampingan provinsi didasarkan atas capaian keempat variabel, yaitu Ketepatan waktu (Qday); jumlah kelurahan tepat waktu (QStepat); nilai capaian output (KPI); dan jumlah kelurahan dengan KPI tercapai (%Kel_KPI). Capaian dari masing-masing variabel dikualitatifkan dalam kategori tercapai dan tidak tercapai. Tingkatan kinerja adalah sbb :

High satisfactory	3-4	tercapai
Satisfactory	2	variabel tercapai
Moderat	1	variabel tercapai
Unsatisfactory	tidak ada variabel yang tercapai	

Rating provinsi untuk periode Juni-2013 adalah sbb :

Provinsi_nama	Qday	QStepat	KPI	%Kel_KPI	Kinerja
JAWA TENGAH					
D.I. YOGYAKARTA	tercapai	tdk tercapai	tercapai	tdk tercapai	Satisfactory
JAWA TIMUR	tercapai	tdk tercapai	tdk tercapai	tdk tercapai	Moderat
BALI					
NUSA TENGGARA BARAT	tdk tercapai	tdk tercapai	tdk tercapai	tdk tercapai	Unsatisfactory
NUSA TENGGARA TIMUR					
	tercapai	tercapai	tercapai	tdk tercapai	High Satisfactory
KALIMANTAN TENGAH	tdk tercapai	tdk tercapai	tdk tercapai	tdk tercapai	Unsatisfactory
KALIMANTAN SELATAN	tdk tercapai	tdk tercapai	tdk tercapai	tdk tercapai	Unsatisfactory
KALIMANTAN TIMUR	tdk tercapai	tdk tercapai	tercapai	tdk tercapai	Moderat
SULAWESI UTARA					
SULAWESI TENGAH	tdk tercapai	tdk tercapai	tercapai	tdk tercapai	Moderat
SULAWESI SELATAN	tdk tercapai	tdk tercapai	tercapai	tdk tercapai	Moderat
SULAWESI TENGGARA	tdk tercapai	tdk tercapai	tercapai	tercapai	Satisfactory
GORONTALO					
SULAWESI BARAT					
MALUKU	tdk tercapai	tdk tercapai	tercapai	tdk tercapai	Moderat
MALUKU UTARA					
PAPUA BARAT					
PAPUA	tdk tercapai	tdk tercapai	tdk tercapai	tdk tercapai	Unsatisfactory

